

MEMBANGUN SOLI MENGHADAPI TANTANG



OLEH :
KOMJEN POL DRs IMAM SUJARWO MSI

REFORMASI Polri, yang dimulai pada tahun 1999, ditiitikberatkan pada tiga aspek yaitu Reformasi Polri pada aspek Instrumental, aspek Struktural dan aspek Kultural. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang mengatur tugas pokok Polri dan menetapkan bahwa Polri tidak lagi berada dalam lingkungan ABRI, adalah merupakan keberhasilan utama dari program reformasi tersebut.

Reformasi pun bergulir dengan cepat, ditandai dengan berbagai studi dan kajian untuk menetapkan postur yang tepat untuk Polri, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang harus mencerminkan Polri sebagai institusi penegak hukum dalam tatanan politik demokratis.

Dalam mencermati perkembangan lingkungan Strategik baik Global, Regional, maupun Nasional secara langsung atau pun tidak langsung telah memberikan pengaruh dan perubahan yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Untuk mencermati pengaruh Lingkungan Strategik tersebut, Polri menyusun Grand Strategi tahun 2005 - 2025 dengan pentahapan sebagai berikut :

Tahap I Tahun 2005 sampai 2009
Tahap " Membangun Kepercayaan Masyarakat "(Public Trust Building)

Tahap II Tahun 2010 sampai 2014
Tahap " Membangun Kemitraan " (Partnership Building)

Tahap III Tahun 2015 sampai 2025
Tahap " Mencapai Keunggulan " (Strive for Excellence)

Untuk mencapai tahapan-tahapan tersebut dibuat Rencana Strategi (Renstra) untuk setiap fungsi dan bidang dalam intitusi Polri yang menjelaskan secara rinci tentang apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, siapa yang melakukan, kriteria / ukuran keberhasilan dan lain-lain.

Untuk mempercepat keberhasilan

pencapaian tujuan sebagaimana pentahapan tersebut, dikeluarkanlah kebijakan Polri pada bulan Oktober 2008 tentang Program Akselerasi Transformasi Polri menuju Polri yang Mandiri, Profesional, Modern dan dipercaya masyarakat. Kebijakan tersebut berisi program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesegera mungkin untuk memastikan bahwa upaya membangun kepercayaan masyarakat, sebagai sasaran pencapaian Tahap I dari Grand Strategi yang akan dicapai dengan dikeluarkannya Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 37 / IX / 2008 , tanggal 27 Oktober 2008 tentang Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri yang meliputi meliputi 3 (tiga) program yaitu:

Keberlanjutan Program (Sustainability Program), Peningkatan kualitas kinerja (Performance Quality Improvements)

Komitmen terhadap organisasi (Organizational Comitment)

Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, bahwa semua Lembaga dan Kementerian harus melaksanakan reformasi birokrasi, maka Program Grand Strategi Polri dan Program Akselerasi Transformasi Polri diintegrasikan dalam program Reformasi birokrasi Polri. Dan untuk itu telah ditetapkan Program Unggulan Polri yang disebut QUICK WINS (Keberhasilan segera) dalam rangka Reformasi Birokrasi Polri yang antara lain meliputi :

- Quick Response Patroli Samapta
- Transparansi Pelayanan SIM, STNK dan BPKB
- Transparansi Pelayanan Penyidikan melalui SP2HP
- Transparansi Rekrutmen Personel Polri

Program Unggulan Polri yang disebut dengan QUICK WINS tersebut telah di-launching oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30

DITAS POLRI DALAM AN MASA DEPAN



MEMBANGUN SOLIDITAS PADA INSTITUSI POLRI

Berbicara masalah soliditas tidak lepas dari suatu Bangsa / Negara / organisasi dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas. Soliditas mempunyai makna suatu Kekuatan atau kekokohan dalam suatu Bangsa / Negara / organisasi dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang dihadapi saat ini. Didalam aktualisasinya soliditas dilandasi oleh nilai-nilai yang mengandung semangat pengabdian, rela berkorban, pantang menyerah, tahan menderita serta mendahulukan kepentingan Organisasi / Masyarakat, Bangsa dan Negara.

“Perlu diingat dalam sejarah bangsa Indonesia, bahwa perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia yang dilakukan secara bersama – sama oleh seluruh komponen bangsa yang dilandasi dengan semangat kebangsaan ternyata berhasil dengan baik. Keberhasilan ini terutama dilandasi oleh soliditas bangsa Indonesia pada saat itu sebagai akibat ketidakpuasan rakyat Indonesia terhadap kesewenang-wenangan penjajah Belanda.”

Bagaimana dengan Polri yang saat ini memasuki usia yang ke-64 pada 1 Juli 2010, apakah kita masih memiliki Soliditas yang Kuat, Kokoh dan Tangguh terhadap institusi Polri dan sejauh mana Jiwa Korsia / yang dilandasi semangat / rasa kebersamaan yang kita miliki sesama Anggota Polri, seiring dengan sejarah perjalanan institusi Polri yang kita cintai.

Sejarah perjuangan Polri mulai dari tahun 1945 sampai sekarang telah mengalami pasang dan surut sesuai dengan tuntutan dan perkembangan Masyarakat, tentu kita menyadari bahwa Polri sebagai lembaga Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan yang berperan sangat strategis bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mempunyai

Januari 2009 yang dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak kinerja oleh para Kapolda dan diikuti oleh seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan Kontrak Kerja terhadap para pejabat yang mendapat amanah untuk menjalankan tugas sebagaimana dalam UU No 2 Tahun 2002 untuk mewujudkan komitmen terhadap Integritas kepada Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Disaat Polri telah melaksanakan Program Tahap I tahun 2005 – 2009 dan memasuki tahun 2010 – 2014 yang merupakan Renstra Polri tahap II, dimana tahun 2010 merupakan tahun pertama dilaksanakannya Program Partnership Building (Membangun Kemitraan), telah terjadi permasalahan Internal (Kasus “SD”) yang berdampak sangat luas dan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat pada Polri. Bahkan kasus-kasus hukum yang sedang dilakukan penyelidikan oleh polri telah terseret kepada kepentingan - kepentingan politik yang pada akhirnya menimbulkan

ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri. Prestasi dan keberhasilan yang telah diukir selama ini (hampir 10 tahun) sejak Reformasi seolah-olah tiada berarti, dimana masyarakat masih menaruh ketidakpercayaan kepada Polri dan belum mampu memulihkan citra Polri.

Berdasarkan hasil kajian Team Reformasi Birokrasi Nasional dan Team Independen Reformasi Birokrasi Nasional bahwa Institusi Polri merupakan lembaga Pemerintah yang telah melakukan Reformasi dengan cepat dan menunjukkan perubahan yang sangat signifikan, langkah – langkah pembangunan Polri melalui Reformasi Birokrasi Polri terus dilakukan namun kondisi inipun masih belum cukup untuk mengembalikan pencitraan Polri, untuk itu Polri beserta seluruh Jajarannya mulai dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas harus membangun Soliditas Institusi Polri dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks dan penuh dengan ketidakpastian.

tugas pokok memelihara kamtibmas, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU No 2 tahun 2002, dengan kata lain semua yang dijalankan oleh Polri didalam melaksanakan tugas pokoknya diorientasikan untuk kepentingan Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Untuk membangun soliditas, didalam diri setiap anggota Polri harus tumbuh kesadaran kolektif (Disiplin, Loyalitas dan Integritas) untuk membela organisasi Polri dari setiap upaya mendiskreditkan / menghancurkan / mengkerdikan Institusi Polri. Menurut Emille Durkheim (Doyle P Jhonson; 1985) kesadaran kolektif adalah perasaan individu sebagai anggota suatu kelompok / organisasi dan karena kesadarannya itu individu bertanggung jawab untuk melakukan apa yang dituntut oleh kelompoknya / Organisasinya dimana Kesadaran kolektif sebagai faktor pendorong tumbuhnya soliditas Kesatuan yang tidak muncul dengan sendirinya, tetapi tumbuh dan berkembang melalui proses sosialisasi dengan pemberdayaan Kesatuannya (pengetahuan, ketrampilan dan kekuatan) agar berpartisipasi dalam menjalankan Tugas kelompoknya.

Disisi lain Polri dihadapkan pada tantangan tugas kedepan yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian untuk itu perlu digali dan dihidupkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Soliditas untuk membangun Polri kedepan. Untuk membangun Soliditas pada institusi Polri dalam menghadapi tantangan kedepan, maka perlu menanamkan nilai – nilai dari soliditas antara lain :

MEMILIKI JIWA KORSA / ESPRIT DE CORPS

Jiwa korsa adalah semangat atau jiwa suatu institusi / kesatuan dalam organisasi, semangat dan antusiasme yang tertanam pada anggota termasuk pimpinannya terhadap organisasinya. Jiwa korsa merupakan kondisi atau jiwa organisasi secara totalitas, mulai dari anggota sampai dengan unsur pimpinan, sedangkan moral merupakan kondisi atau jiwa perseorangan. Untuk itu antara moral dan jiwa korsa mempunyai hubungan pengaruh yang timbal balik dalam suatu organisasi yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Apabila ada ketidakpuasan pada kesatuan, maka jiwa korsa dapat memadamkan ketidakpuasan tersebut. Ciri-ciri jiwa korsa yang baik adalah :

- Selalu menjaga kekompakan dan kesetiakawanan mulai dari bawahan sampai dengan unsur pimpinan.
 - Selalu menjaga nama baik Institusi/ Lembaga dari cercaan/ hinaan baik dari dalam maupun dari luar.
 - Meningkatkan kerja sama untuk kemajuan institusi/ Lembaga
 - Antusiasme dan rasa kebanggaan setiap individu atau kelompok dalam organisasinya.
 - Memiliki Reputasi yang baik terhadap organisasi yang lain.
 - Semangat persaingan secara sehat dan bermutu.
 - Adanya kemauan individu/kelompok untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan.
 - Semangat dan Kebanggaan terhadap organisasinya dan kesediaan individu/golongan untuk saling bahu-membahu untuk kemajuan organisasinya.
- Jiwa korsa dapat ditumbuhkembangkan dan dipelihara melalui

pembinaan tradisi kesatuan seperti : pembinaan nilai-nilai kejuangan, pembinaan rohani dan mental, pembinaan fisik / olah raga bersama, upacara-upacara yang dapat menumbuhkan nilai-nilai kejuangan, menetapkan motto, semboyan atau slogan kesatuan dan lagu-lagu kejuangan, pemberian reward dan punishment dan lain-lain. Untuk membangun Jiwa Korsa institusi Polri harus tertanam nilai-nilai yang terkandung didalamnya antara lain :

Memiliki disiplin yang tinggi

Disiplin merupakan syarat mutlak bagi setiap anggota Polri guna meraih kepercayaan masyarakat (public trust) menuju profesionalisme sesuai tugas pokok, fungsi, dan perannya. Tanpa disiplin anggota, kepercayaan masyarakat mustahil dapat diraih, padahal kepercayaan merupakan prasyarat tercapainya profesionalisme suatu profesi.

Disiplin anggota Polri pada hakekatnya mencakup dua hal, yaitu keharusan untuk mentaati kewajiban dan larangan dalam rangka kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri.

Disiplin merupakan perwujudan sikap mental dan perilaku seseorang ditinjau dari aspek ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu peraturan maupun berbagai hukum yang berlaku di kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial. Sebagai contoh, disiplin dikemas dalam kehidupan di pendidikan/sekolah, kemiliteran, instansi pemerintah dan lain sebagainya

Dalam hal ini, bagaimana indikator disiplin dapat dicapai dalam lingkungan kepolisian, khususnya bagi anggota Polri, sebagaimana diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait, beberapa indikator keberhasilan Polri dalam menjaga kedisiplinan meliputi :

Dalam rangka kehidupan bermasyarakat dan bernegara

- Tidak melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau kelembagaan Polri.
- Tidak melakukan kegiatan politik praktis. Tidak mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- Tidak melakukan tindakan-tindakan yang bermotif mencari keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan kepentingan Negara.
- Tidak memiliki saham/modal dalam



perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kewenangan sebagai aparat kepolisian.

- Tidak menjadi pelindung (backing) perjudian, tempat maksiat, atau tempat-tempat hiburan.
- Tidak menjadi penagih piutang (debt collector) atau pelindung orang yang mempunyai utang.
- Tidak menjadi perantara / makelar perkara.
- Tidak menelantarkan keluarga.

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri, beberapa masalah disiplin diantaranya :

- Tidak membocorkan rahasia operasi kepolisian.
- Tidak meninggalkan wilayah tugas atau kesatuan tanpa ijin (mangkir).
- Tidak menghindari tanggung jawab kedinasan.
- Tidak menyalahgunakan fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi.
- Tidak memihak, mempengaruhi, atau memanipulasi perkara, dan atau membuat opini negatif atas rekan kerja, pimpinan, atau kesatuan.
- Tidak melakukan upaya paksa di luar kewenangannya.
- Tidak menyalahgunakan wewenang dan atau bertindak sewenang-wenang.
- Tidak memasuki tempat-tempat terlarang, kecuali dalam rangka penugasan.
- Tidak melakukan pungutan tidak sah untuk kepentingan pribadi
- Tidak memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas.

MEMILIKI LOYALITAS

Loyalitas adalah kualitas kesetiaan kepada Negara, bangsa dan tanah air, organisasi, antara atasan dan bawahan maupun dengan sesama. Setiap tindakan anggota organisasi harus mencerminkan sikap loyalitas terhadap organisasi dan perintah atasan, serta jangan sampai mengkhianati organisasinya/membicarakan masalah organisasi di luar lingkungan sendiri. Didalam organisasi manapun yang terstruktur dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah didalamnya ada hirarki berdasarkan struktur jabatan/ kepangkatan secara bertingkat/ berjenjang. Demikian juga terhadap organisasi Polri yang terstruktur dari tingkat pusat sampai dengan kewilayahan yang didalam pelaksanaan tugasnya diatur dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat agar organisasi berjalan dengan solid



MEMILIKI INTEGRITAS

Integritas adalah kekuatan berpikir dengan keteguhan watak yang sehat dengan kebiasaan yang menghasilkan produktivitas yang dilandasi dengan kekuatan moral untuk bersikap dan berperilaku yang mampu memberikan keteladanan, suka akan kebenaran, kejujuran, ketulusan hati, dan perasaan halus untuk mempengaruhi orang lain dalam melakukan perbuatan proses berpikir yang benar. Untuk membangun integritas, dimulai dari diri sendiri yang menunjukkan keteladanan secara konsisten untuk mempengaruhi orang lain/memberikan dorongan motivasi untuk membangun integritas kelompok/organisasi, dengan kata lain untuk menumbuhkembangkan integritas kelompok/organisasi dengan cara :

Menumbuhkembangkan kepercayaan dan keyakinan dengan merubah kesadaran individu untuk merubah yang lebih baik.

Saling menghormati dan menghargai orang lain.

Memiliki kemampuan dalam kedisiplinan rohani, sosial dan intelektual.

Untuk membangun integritas pada organisasi sangat tergantung pada seberapa besar Jiwa Korsa/Esprit de corps/Loyalitas setiap Individu/Kelompok terhadap semangat dan kebersamaan untuk membangun profesi yang dijalankan secara Profesional. Dalam membangun integritas di lingkungan Polri baik secara individu maupun organisasi, ada 5 (lima) hal yang penting yang harus diwujudkan pada setiap level tingkatan yaitu:

INTEGRITAS MORAL

Berlaku jujur dan bertindak benar terhadap diri pribadi pada setiap saat dan dimanapun berada dan bertugas.

Semua pernyataan hendaknya tepat dan dapat dipercaya, baik resmi maupun tidak resmi.

Bertahanlah pada suatu pendapat yang diyakini dan benar.

Dalam setiap masalah, tempatkanlah kejujuran tugas dan prinsip-prinsip moral di atas segalanya.

Integritas terhadap organisasi Polri

Integritas tinggi yaitu perilaku anggota Polri yang dalam bekerja senantiasa menjaga sikap profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas (kejujuran, kesetiaan, komitmen dan Konsisten) serta menjaga keutuhan organisasi dan menyadari bahwa kita dididik, dibesarkan oleh organisasi Polri untuk itu setiap tindakan dan perilaku berdasarkan nilai-nilai etika yang ada dalam organisasi Polri (dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung) artinya dimana kita bertugas harus menjunjung nilai – nilai dari organisasi dimanapun kita bertugas.

Integritas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bahwa dalam pelaksanaan tugas diorientasikan kepada kepentingan bangsa dan negara untuk terwujudnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua tugas yang diberikan oleh bangsa dan negara merupakan kehormatan dan kepercayaan negara kepada kita sebagai anggota Polri dan setiap tugas yang dilaksanakan sebagai wujud pengabdian terhadap masyarakat bangsa dan Negara.

Integritas memberikan pelayanan yang humanis tapi tegas

Dalam melaksanakan tugas dituntut keseriusan dan ketegasan bertindak dari setiap anggota Polri secara individu maupun kelompok dan bersikap serta berperilaku sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang santun dan simpatik.

Menampilkan sikap simpatik, perilaku terpuji, keteladanan serta tidak arogan / tidak merasa sok kuasa dalam tindakan.

Bicara dengan intonasi yang tidak

menunjukkan sikap emosional dan gerak-gerik yang menunjukkan sikap bersahabat dan tidak diskriminatif.

Integritas ketauladanan ditengah masyarakat

Mejunjung tinggi nilai etika dan norma sosial yang berlaku serta budaya setempat.

Berikan nilai tambah pada lingkungannya, dengan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat.

Tulus ikhlas dan bersungguh-sungguh serta penuh simpati dalam membantu korban bencana / musibah sehingga dapat mengurangi penderitaan yang dialami.

Apabila kata integritas dimaknai dalam huruf mempunyai makna sebagai berikut : I (Ikrar), N (Niat), T (Tabiat), E (Emosional), G (Guna), R (Rasional), I (Ikhsan), T (Tawakal), A (Amanah), S (Sabar).

Jadi kalau diuntai dalam satu kalimat akan bermakna bahwa " Manusia secara sadar membuat ikrar dengan membangun niat sebagai keinginannya secara ikhlas untuk meningkatkan kedewasaan emosional agar memberi guna dalam pikiran rasional dengan berbuat ikhsan akan memperoleh kebaikan dunia yang berlandaskan dengan ketaqwaan amanah sabar uuntuk bersikap dan berperilaku yang benar ".

KEPEMIMPINAN POLRI YANG TRANSFORMASIONAL

Pemimpin yang baik semestinya memiliki waktu yang cukup banyak untuk membina pendukungnya, menolong mereka mengenali potensi mereka, menolong mereka mengenali kekhasan diri mereka dan visi pribadi mereka. Hal ini dilakukan dengan cara membuat orang mengenali dimensi yang luhur dari dirinya, membuat mereka jadi mampu memimpin dan meraih, serta membuat mereka memiliki kesempatan untuk menerapkan apa yang mereka miliki. Seorang pemimpin akan dikenal dari kemampuannya merumuskan visi yang menjadi impian bersama dari komunitas di mana ia berada. Ketajaman, keutuhan dan kesederhanaan visi ini akan membuatnya menjadi kuat. Kualitas kepemimpinannya terlihat dari gerak maju yang ia hasilkan bersama komunitasnya.

Dengan demikian seorang pemimpin yang hanya menciptakan suasana mandeg, stabil atau status quo pada dasarnya sudah tidak lagi menjadi pemimpin sejati yang diinginkan. Lebih jauh lagi, sebenarnya seorang pemimpin dapat dikenali dari adanya transformasi individual dan sistemik yang terjadi. Artinya ialah bahwa tiap individu termasuk diri sang pemimpin terus mengalami perubahan dimana potensi-potensi mereka terus bertumbuh sementara keseluruhan organisasi atau komunitas mereka ikut berubah. Sehingga apabila seorang pemimpin berhasil dalam mestransformasikan

potensi organisasinya kepada seluruh anggotanya, maka akan terwujud satu persepsi dan satu langkah dalam menjalankan tugas kewajibannya sebagai pimpinan dan bawahan/ anggota dari suatu organisasi tersebut.

Dalam menghadapi perkembangan situasi dan masa depan yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian maka Polri selaku institusi yang mempunyai tugas pokok memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dan mampu menjawab tantangan yang ada sesuai aspirasi dan harapan masyarakat.

Untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan yang terjadi guna mengantisipasi permasalahan yang timbul, diperlukan kepemimpinan yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan organisasi, berwawasan kedepan dan mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Kepeimpinan mutlak diperlukan pada setiap tingkatan organisasi, karena tumpuan utama dalam proses penciptaan nilai adalah terletak pada anggota. Pimpinan adalah orang-orang yang ada di barisan terdepan untuk memperjuangkan perubahan. Oleh karena itu pemimpin harus mampu membuahkan pemikiran yang besar dengan memulai langkah-langkah kecil untuk mencapainya, dengan kata lain bahwa seorang pemimpin harus bertindak global dan berpikir lokal.

Dalam menghadapi tantangan masa depan, di Era reformasi yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa menuntut berlangsungnya transformasi dan pergeseran fokus dalam berbagai aktivitas kehidupan kita, demikian juga terhadap tugas-tugas Kepolisian yang kita jalankan dalam kehidupan organisasi. Penekanan Reformasi total yang menjadi fokus atau perhatian utama adalah pada integrasi organisasi yang bermanfaat untuk mencapai target keselarasan dalam segala bidang, seperti pelayanan masyarakat, kinerja Polri dari seluruh jajarannya, sistem, nilai, visi, kompetensi, manajemen, pelatihan, kultur, dan tujuan organisasi Polri.

Dengan tingkat perubahan lingkungan global yang sangat tinggi, instabilitas ekonomi, deregulasi, politik, sosial budaya, agama dan lain lain serta perubahan secara global menjadi sangat sulit diprediksi, dibutuhkan kehadiran seorang pemimpin yang mampu membawa Organisasi untuk melakukan perbaikan secara terus-



menerus (continuous improvement) dalam pembentukan keunggulan kompetitif yang mampu untuk berkembang dengan dilandasi keluwesan dalam menghadapi tantangan tugas, memiliki team kerja yang baik, adanya kepercayaan dan pengakuan dari orang yang dipimpinya dan dari masyarakat.

Di samping itu yang tidak kalah pentingnya bagaimana seorang pemimpin dan bawahannya/pengikut/anggota dalam menyalurkan organisasi memiliki kualitas baik dari Pemimpin maupun kualitas bawahannya/pengikutnya /anggotanya untuk bersama sama meningkatkan integritas diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi, menciptakan kesadaran para pengikut dengan menyerukan cita-cita yang lebih tinggi dari nilai moral serta Etika bagi seorang pemimpin dan bawahannya dalam organisasi untuk terus menerus mencapai yang terbaik (strive for excellence), demi membangun kepercayaan (built to trust) serta mengembangkan kemitraan (network development). Atau dengan kata lain, Institusi Polri saat ini membutuhkan kehadiran seorang pemimpin yang memiliki soliditas, loyalitas dan Integritas serta kompetensi, secara terus menerus mengembangkan kapasitas diri dan organisasinya, serta mewujudkan nilai-nilai yang dianutnya di dalam praktek keseharian. Mereka selalu mengajarkan, menawarkan berbagai pilihan, informasi, membangkitkan rasa percaya diri serta menciptakan suasana " yang harmonis " sepanjang masa.

Secara praktis strategi pembangunan kepemimpinan organisasi, termasuk Polri di dalamnya, berarti menempatkan semuanya mulai dari pimpinan puncak sampai dengan para anggota organisasi terbawah untuk melaksanakan strategi pembinaan dan operasional secara efektif. Untuk itu pemimpin dan bawahan harus memahami kebutuhan organisasi secara strategis, karena tidak mungkin pelaksanaan manajemen strategis berjalan dengan baik tanpa pemahaman dari seluruh unsur yang ada dalam organisasi.

Dalam kaitan inilah, Polri sebagai suatu entitas dengan jumlah konstituen yang sangat besar, lebih dari 400.000 Personil Polri, keberhasilannya dalam mengemban amanat sebagaimana tertuang di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan sangat ditentukan oleh seberapa efektif para pemimpinnya dalam menggerakkan dan mengarahkan



para anggotanya secara baik, dengan pola-pola yang efektif serta cara-cara yang efisien, memiliki kemampuan mentransformasi dan mampu mengorganisasikan masyarakat dan seluruh anggota bawahannya dengan visi dan misi ke arah masa depan (kepemimpinan transformasional).

Untuk dapat membangun soliditas Institusi Polri diperlukan kepemimpinan transformasional yang memiliki :

VISI YANG JELAS HARMA - WASPADA

Pemimpin yang memiliki kegesitan, kecepatan serta mampu beradaptasi dalam membawa jalannya organisasi memiliki peran yang penting dalam menghadapi kondisi organisasi yang senantiasa mengalami perubahan. Sebab, fleksibilitas organisasi pada dasarnya merupakan karya orang-orang yang mampu bertindak proaktif, kreatif, inovatif dan non konvensional. Pribadi-pribadi seperti inilah yang dibutuhkan sebagai pemimpin organisasi Polri saat ini. Seorang pemimpin adalah inspirator perubahan dan visioner, yaitu memiliki visi yang jelas ke arah mana organisasi akan di bawa. Menurut Peter Senge (Saeful Millah, 2003) melalui karya terkenalnya, "The Fifth Discipline" (1997) melontarkan gagasannya bahwa sebuah organisasi hanya akan mampu beradaptasi

dengan perubahan apabila ia mampu menjadikan dirinya tampil se-

bagai sebuah organisasi pembelajaran, learning organization, yakni sebuah organisasi yang dibangun oleh orang-orang yang secara terus-menerus mau memperluas kapasitas dirinya dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Salah satu disiplin yang harus dilakukan dalam rangka learning organization adalah membangun visi bersama, shared vision, yakni harapan bersama tentang masa depan yang ingin dicapai organisasi. Sebuah visi benar-benar merupakan visi bersama apabila setiap orang memiliki gambaran yang sama dan setiap orang merasa memiliki komitmen untuk mencapainya. Untuk menjalankan visi bersama secara benar akan memberikan dampak pencerahkan organisasi, karena :

- Visi memberikan sense of direction yang amat diperlukan untuk menghadapi krisis dan berbagai perubahan.
- Visi memberikan fokus. Fokus merupakan faktor kunci daya saing perusahaan untuk menjadi nomor satu di pasar. Karena focus mengarahkan kita tetap pada bidang keahlian yang kita miliki.
- Visi memberikan identitas kepada seluruh anggota organisasi. Ini baru terjadi bila setiap individu menerjemahkan visi tersebut menjadi visi dan nilai pribadi mereka.
- Visi memberikan makna bagi orang

yang terlibat di dalamnya. Orang akan menjadi lebih bergairah dan menghayati pekerjaan yang bertujuan jelas.

SIFAT MELAYANI

Pemimpin yang melayani merupakan salah satu sifat dari pemimpin yang transformasional, yang dilakukan dengan menghayati makna peran sebagai orang yang melayani. Seorang yang melayani tidak melakukan hal itu karena ia ingin menebus dosa atau kesalahannya di masa lalu. Ia juga bukan melakukan hal itu agar orang merasa iba padanya.

Pemimpin yang melayani melakukan hal itu karena ia ingin dengan melayani orang-orang, ia membuka kesempatan agar orang-orang di sekitarnya memiliki kebebasan lebih luas untuk berkembang atau mengalami transformasi. Dengan bahasa sederhana ia dapat menjadi pemimpin yang melayani bila, memiliki hati yang melayani. Seringkali ia melakukan hal ini karena ia pernah merasakan dilayani seseorang, mengalami pemulihan karena ditolong seorang pemimpin, mengembangkan visi yang tajam karena dialog dengan seorang pemimpin dan sebagainya.

Seorang pemimpin yang melayani adalah seorang pemimpin yang sangat peduli atas pertumbuhan dan dinamika kehidupan pengikut, dirinya dan komunitasnya dan karenanya ia mendahulukan hal-hal tadi daripada pencapaian ambisi pribadi atau pola dan kesukaan pribadinya saja. Ciri-ciri pemimpin yang melayani :

Pemimpin yang melayani memberikan teladan-teladan untuk perilaku dan sikap yang ia ingin hadir dan menjadi bagian utama dari hidup pengikutnya. Jadi ia tidak memaksa orang untuk mengambil alih suatu perilaku atau memaksa dengan berbagai aturan hal-hal yang ia inginkan. Ia memberikan ilham melalui demonstrasi model, pemberian teladan dan penentuan batas-batas perilaku dengan melaksanakannya sendiri.

Pemimpin yang melayani sering bekerja dalam kerangka pikir waktu yang panjang. Ia tidak mengharapkan hasil spektakuler terlalu cepat karena ia menyadari bahwa untuk menggerakkan dan mentransformasi orang diperlukan waktu yang panjang dan proses yang sinambung.

Pemimpin yang melayani melakukan komunikasi yang bersifat dua arah. Ia bahkan tidak berkeberatan bila pendukungnya berbicara satu sama lain tanpa melibatkannya.

Pemimpin yang melayani juga dapat hidup di tengah kepelbagaian



pendapat, bahkan ia merasa tidak nyaman bila pendapat, paradigma, dan gaya kerja hanyalah sejenis saja.

Pemimpin yang melayani memberikan kepercayaan dan wewenang pada pengikutnya. Ia memiliki gambaran positif dan optimis tentang mereka. Ia memberdayakan mereka melalui sharing pengetahuan, skill dan perspektif.

Pemimpin yang melayani menggunakan persuasi dan logika untuk mempengaruhi orang selain penela-danan.

Pemimpin yang melayani tidak berupaya menjadi pahlawan, namun menciptakan dan melahirkan pahlawan-pahlawan.

Pemimpin yang melayani mengerjakan banyak hal dan juga menghindari dari berbagai hal yang orang lain dapat lakukan.

Hal yang perlu dicatat disini adalah bahwa pemimpin yang melayani tidak berarti akan menghindari dari masalah atau konflik. Ia tidak juga menjadi sosok yang dikendalikan oleh berbagai kelompok yang kuat. Bagaimana secara nyata pemimpin yang melayani untuk mengambil keputusan ?

Pertama, ia mencari data atau informasi dengan bertanya, meneliti, serta menyimak berbagai hal.

Kedua, ia mengembangkan intuisi dan melihat apa yang tidak kasat mata.

Ketiga, ia memimpin orang dengan persuasif namun tidak memaksakan kehendaknya.

Keempat, ia memberikan kejelasan visi bersama yang akan dicapai, dan langkah-langkah perubahan yang diperlukan.

Kelima, memberdayakan orang-orang di sekitarnya melalui berbagai kesempatan.

PROFESIONALISME POLRI

Dalam membangun soliditas Polri,

selain memerlukan jiwa korsa dan kepemimpinan transformasional harus didukung juga dengan profesionalisme Polri sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranan Polri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002.

Kita menyadari bahwa tugas Polri yang begitu kompleks memerlukan keahlian dan ilmu pengetahuan secara konseptual dan teorikal untuk memecahkan permasalahan – permasalahan yang berkaitan dengan tugas Kepolisian. Untuk dapat menjalankan tugas Kepolisian diperlukan keahlian tertentu yang menjadi profesinya. Menurut Huntington (2003,4-7) yang dikatakan orang yang profesional adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus pada bidang tertentu yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat yang diperoleh dari pendidikan dan pengalaman. Profesionalisme dapat mengacu pada kriteria profesional yaitu :

Menggunakan teori ilmu pengetahuan untuk pekerjaannya.

Keahlian yang berdasargkan pendidikan atau pelatihan secara rutin dan berkesinambungan.

Pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Memiliki otonomi dan cara mengontrol perilaku anggota.

Mengembangkan kelompok profesi

melalui asosiasi seperti The International Association of Chief of Police (Donald C, William, The American law enforcement Chief Executif : A Management Profile, 198,. dalam Djamin, 1999,8). Jadi profesionalisme adalah dasar-dasar sikap, cara berpikir, tindakan, perilaku, yang dilandasi oleh Ilmu Kepolisian yang diabdikan pada kemanusiaan dalam wujud perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai organisasi publik, Polri harus dapat menjalankan tugas

dengan baik/profesional, sehingga hasil pekerjaan yang dilakukan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan penataan yang berkaitan dengan kemampuan profesionalismenya, pemahaman terhadap ilmu pengetahuan, dan pemanfaatan serta dukungan sumber daya (personil, materil, anggaran dan metode), sehingga dapat memelihara keseimbangan kinerja polri yang mahir, terpuji dan patuh hukum guna menciptakan kepercayaan masyarakat sebagai wujud kemandirian (independensi) Polri.

Polri dalam melaksanakan tugasnya dihadapkan kepada tantangan kedepan, untuk itu Polri dan masyarakat dalam hubungan kekuatan yang relatif seimbang dan saling overlapping dengan landasan utamanya adalah hubungan yang tulus antara Polri dengan warga masyarakat yang ditindak lanjuti dengan menerapkan strategi atau kebijaksanaan untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif dan efisien dalam mengendalikan kejahatan. Dimana Polri sadar akan kemampuannya yang terbatas dan tidak tahu kapan dan dimana kejahatan terjadi dan siapa pelakunya, sehingga untuk mencapai keberhasilannya harus mendapatkan dukungan atau tempat dalam kehidupan masyarakat dengan cara mengurangi rasa ketakutan masyarakat, menciptakan, memelihara keteraturan sosial dan memperbaiki keteraturan sosial yang rusak akibat konflik.

Polri juga sadar dan berupaya untuk memperbaiki kualitas pelayanannya dengan melibatkan dalam warga masyarakat untuk ikut berperan aktif dan peduli dalam pengambilan kebijakan dalam rangka menciptakan dan memelihara keteraturan sosial dalam masyarakat. Polri dalam masyarakat yang demokratis pemolisianannya mengacu pada dasar-dasar atau prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam rangka membangun Polri yang profesional, maka titik berat harus difokuskan pada pembinaan SDM Polri yang baik dalam rangka menghadapi tantangan dan upaya pemolisian warga agar mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Hal tersebut dibangun antara lain dengan membangun budaya organisasi Polri melalui:

Membangun sistem pembinaan SDM yang fair dan bertanggung jawab,

Membangun aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana strategi-strategi yang diformalisasikan serta dibuat standarisasi dengan jelas, sehingga dapat mendukung sistem operasional yang efektif dan dapat menjadi

kan pedoman bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya serta dapat menghambat atau memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Orientasi pelayanan pada masyarakat dengan mengedepankan fungsi Babinkamtibmas,

Adanya lembaga yang netral dan mandiri dan sekaligus penasehat dan pendukung Polri dalam menciptakan dan menjaga kamtibmas/Komisi Kepolisian.

Mewujudkan Polri yang profesional merupakan keharusan yang tidak dapat ditolak, hal ini sesuai dengan perkembangan Negara RI yang menuju era masyarakat yang demokratis. Sumber daya manusia merupakan asset dari Polri, juga merupakan asset dari Bangsa. Oleh sebab itu untuk mewujudkan Polri yang profesional, harus dilakukan melalui proses pembinaan personal yang dilakukan secara bertahap.

KESIMPULAN

Program Reformasi Polri telah berjalan lebih dari 1 dasa warsa (10 tahun), Polri telah menyusun Grand Strategi 2005-2025 yang saat ini sudah memasuki Tahap II (Partnership Building). Guna percepatan pencapaian tujuan Polri juga telah menetapkan Program Akselerasi Transformasi, dan Program Qick Wins dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi. Namun memasuki awal Grand Strategi Tahap II telah terjadi permasalahan internal Polri yang berdampak sangat luas dan membias terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Polri bahkan terseret kepada kepentingan politik yang dapat menurunkan citra Polri di masyarakat, prestasi yang telah dibangun oleh Polri selama ini seolah-olah tiada berarti akibat dari ulah oknum Polri yang tidak memiliki soliditas dan jiwa korsa terhadap institusi Polri.

Polri merupakan lembaga negara yang memiliki tugas pokok, fungsi

dan peranan yang strategis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya memiliki sumber daya manusia yang sangat besar yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan sumber daya manusia yang cukup besar, apabila tidak memiliki soliditas terhadap institusi Polri, akan menimbulkan permasalahan internal sehingga akan berpengaruh terhadap profesionalisme Polri.

Untuk membangun soliditas setiap anggota Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi harus memiliki jiwa korsa (disiplin, loyalitas dan integritas) dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara. Soliditas anggota Polri tidak terlepas dari peran para pemimpin Polri pada setiap level tingkatan. Karena pemimpin sangat berperan dalam membawa arah dan tujuan dari organisasi yang dipimpinnya, setiap pemimpin akan mewarnai organisasi yang dipimpinnya untuk membangun soliditas dari setiap anggota Polri.

Untuk itu diperlukan kepemimpinan yang Transformasional, yang memiliki visi yang jelas dan memiliki sifat melayani. Nilai-nilai tersebut di atas menjadi tanggung jawab para pemimpin Polri dari level bawah sampai dengan level atas. Disamping itu pemimpin transformasional dituntut untuk membangun profesionalisme organisasinya (Polri) dalam menghadapi tantangan masa depan yang kompleks dan penuh ketidakpastian.

(Makalah ini merupakan bahan diskusi dalam forum Sarasehan antargenerasi Polri pada Dies Natalis ke-64 Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Juni lalu).





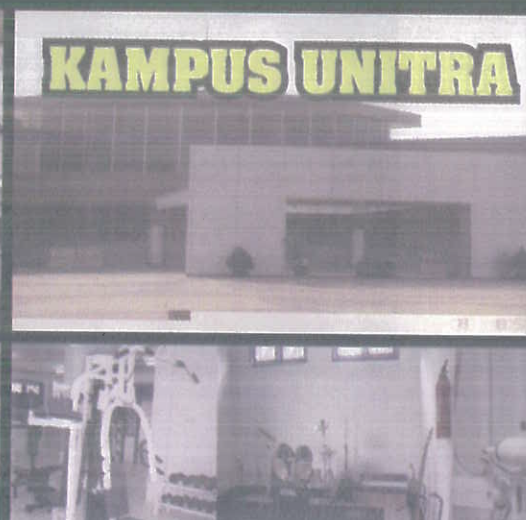
DIRGAHAYU KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-65



AYO BERGURUAN TINGGI!

SELAMATKAN SAUDARA KITA

PROGRAM PENJANGKAUAN DAN PENDAMPINGAN
BNN SIAP MEMBANTU KORBAN DENGAN MEMFASILITASI
TANPA DI PUNGUT BIAYA TRANSPORTASI DAN EVAKUASI
KE UNIT TERAPI REHABILITASI LIDO SUKABUMI



HUBUNGI KAMI SEGERA
KAMPUS UNITRA
 Desa Wates Jaya
 kec Cigombong, Lido, Kab Bogor
 T = 0251-822 09 26

SATGAS - Penjangkauan & Pendamping (JD)
 Gedung BNN Lt 5
 Jl. MT. Haryono No 11 Cawang
 Jakarta Timur 13630
 T= 021-808 715 66 (ext 186)

LOKASI



IKATAN KELUARGA BESAR JAGRATARA

Sekretariat : Komplek Polri Pengadegan Blok O Nomor 24 Jakarta Selatan 12770 Tel/Fax : 021-7991954

Mengucapkan

Selamat & Sukses

ATAS DILANTIKNYA

IRJEN POL. DRS. DJOKO SUSILO, SH, MSI SEBAGAI KAKORLANTAS POLRI
BRIGJEN POL. DRS. BUDI HARTONO UNTUNG SEBAGAI DIRPOLAIR BAHARKAM POLRI
BRIGJEN POL. DRS. YOVIANES MAHAR SEBAGAI WAKA POLDA JABAR
KOMBES POL. DRS. CONDRU KIRONO MM SEBAGAI KAROBINOPS SOPS POLRI
BRIGJEN POL. DRS. SISTERSINS MAMADOA SEBAGAI KAROJEMENGAR SRENA POLRI
BRIGJEN POL. DRS. MAMAN MULYA KARNAMA SEBAGAI KARODALPERSSSDM POLRI
BRIGJEN POL. DRS. BUDI WASESO SEBAGAI KAROPAMINAL DIVPROPAM POLRI
BRIGJEN POL. DRS. I KETUT UNTUNG YOGA ANA SH MM SEBAGAI KAROPENMAS DIVHUMAS POLRI
BRIGJEN POL. DRS. RONNY FRENGKY SOMPIE SH MH SEBAGAI KARO WASDIK BARESKRIM POLRI
BRIGJEN POL. DRS. MOCHAMAD IRIAWAN SH MM MHUM SEBAGAI DIRBINMAS BAHARKAM POLRI
KOMBES POL. DRS. ARKIAN LUBIS SH SEBAGAI DIRKAMNEG BAINTELKAM POLRI
KOMBES POL. DRS. ANAS YUSUF SH MH MM SEBAGAI KAROMISINTER DIVHUBINTER POLRI
KOMBES POL. DRS. ARIEF WICAKSONO SUBIUTOMO SEBAGAI SES NCB INTERPOL INDONESIA DIVHUBINTER POLRI
KOMBES POL. DRS. AGENG SABAR SANTOSO SH MH SEBAGAI DIRTIPIDUM BARESKRIM POLRI
KOMBES POL. DRS. BAMBANG USADI MM SEBAGAI DIR AKADEMIK AKPOL LEMDIKPOL
KOMBES POL. DRS. WAHYU INDRA PRAMUGARI SEBAGAI IRWIL V ITWASUM POLRI
KOMBES POL. DRS. SUMARTONO JOCHANA SH MM SEBAGAI KABAGJAKDIKLAT ROJIANSTRA SSDM POLRI
KOMBES POL. DRS. SETYO WASISTO SH SEBAGAI WADIR KAMNEG BAINTELKAM POLRI
KOMBES POL. DRS. RUSMAWAN SEBAGAI WAKA POLDA LAMPUNG
KOMBES POL. DRS. SUDIARNO SH SEBAGAI KARO OPS POLDA METRO JAYA
KOMBES POL. DRS. MARULI WAGNER DAMANIK SEBAGAI KALABROTEKPOL BIDPPITK STIK LEMDIKPOL
KOMBES POL. DRS. DOLLY BAMBANG HERMAWAN SEBAGAI KABAGNEV ROJIANSTRA SSDM POLRI
KOMBES POL. DRS. HENGKIE KALUARA SEBAGAI SESROPAMINAL DIVPROPAM POLRI
KOMBES POL. DRS. ANDI TAQDIR RAHMANTIRO SEBAGAI KABID JEMEN SETUKPA LEMDIKPOL
KOMBES POL. DRS. ALARAMBE DATO ALLORANTE SEBAGAI WAKA POLDA SULTRA

Selamat mengemban tugas baru

